



RENJA 2024

Dinas Ketahanan Pangan



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam:

Lampiran I	:	Dinas Pendidikan
Lampiran II	:	Dinas Kesehatan
Lampiran III	:	RSUD Datu Sanggul
Lampiran IV	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Lampiran VI	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Lampiran VII	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran IX	:	Dinas Sosial
Lampiran X	:	Dinas Tenaga Kerja
Lampiran XI	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	:	Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	:	Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran XV	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVI	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVII	:	Dinas Perhubungan
Lampiran XVIII	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Lampiran XIX	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XX	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran XXI	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran XXII	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXIII	:	Dinas Perikanan
Lampiran XXIV	:	Dinas Pertanian
Lampiran XXV	:	Dinas Perdagangan
Lampiran XXVI	:	Dinas Perindustrian
Lampiran XXVII	:	Sekretariat Daerah
Lampiran XXVIII	:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampiran XXIX	:	Kecamatan Piani
Lampiran XXX	:	Kecamatan Lokpaikat
Lampiran XXXI	:	Kecamatan Tapin Utara
Lampiran XXXII	:	Kecamatan Bakarangan
Lampiran XXXIII	:	Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran XXXIV	:	Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran XXXV	:	Kecamatan Hatungun
Lampiran XXXVI	:	Kecamatan Salam Babaris
Lampiran XXXVII	:	Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran XXXVIII	:	Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran XXXIX	:	Kecamatan Binuang
Lampiran XL	:	Kecamatan Bungur
Lampiran XLI	:	Inspektorat

- Lampiran XLII : Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Lampiran XLIII : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XLIV : Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XLV : Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 Juli 2023

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 21

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas Taufik dan Petunjuknya Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2024 telah selesai di susun.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 ini adalah merupakan rincian Program Kerja Tahunan sebagai wujud implementasi dan penjabaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang menguraikan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban kedalam kebijakan, Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan pelaksanaan penyuluhan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang, sehingga pada saatnya dapat didefinifkan sebagai pedoman perencanaan bagi lembag maupun daerah.

Diharapkan rancangan ini juga dapat membangkitkan motivasi dan harapan bagi aparat Dinas Ketahanan Pangan. Kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 ini kami mengucapkan terima kasih.

Rantau, Agustus 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Ryza Ramadie, SE

NIP. 19740315 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Review Terhadap Renja Perubahan RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Keg Masyarakat....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN OPD.....	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan.....	19
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	21
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Ketahanan kabupaten tapin	33
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	39
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat

daerah terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renja PD.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja dan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD 2024 – 2026.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan.
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 238, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
 11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10).
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
 17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);
 23. Peraturan Bupati Tapin No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten apin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Bupati Tapin Nomor 15 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15)

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun dalam rangka sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah guna terwujudnya efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 yaitu :

- a. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin;
- b. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui

perencanaan dan pengendalian serta kelitbangan yang bertanggung jawab;

- c. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Renja Perubahan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

3.3. Program, Kegiatan, dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2023 hasil capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan II secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai penyebab kendala dan pencapaian target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin merupakan gambaran dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 yang telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan dengan alokasi dana setelah adanya perubahan/pergeseran terkecuali gaji sebesar Rp.4.001.531.113,- dan dana terserap sampai bulan Juni 2023 sebesar Rp. 1.149.486.736,-. Adapun sisa alokasi dana sebesar Rp.2.852.044.377,-.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
	URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN									
	BIDANG URUSAN PANGAN									
2.09.01	PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	DAERAH KABUPATEN KOTA	pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan									
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 laporan		60%
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	100%	16 Orang/Bulan	48 Orang/Bulan		60%

2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 paket	60%
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	60%
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	60%
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	60%

2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 Paket	60%
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1250 Paket	250 Paket	250 Paket	250 Paket	100%	250 Paket	750 Paket	60%
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Kondisinya Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Kondisinya Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	120 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	72 Unit	60%

	Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya								
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	40 Unit	120 Unit	60%
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang Tersedia	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	60%
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan / stok cadangan pangan daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	50 Ton	10 Ton	10 Ton	0	0%	10 Ton	20 Ton	40%

2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Peningkatan konsumsi sayur dan buah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta	Peta dan Analisis Ketahanan dan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Laporan	60%

	Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan								
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bahan pangan segar yang diujikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Tapin berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin, Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	Meratanya Cadangan Pangan di Seluruh wilayah		Persentase Cadangan Pangan				100%	100%	0%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap isi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Rendahnya Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) disebabkan Stabilitas dan Kontinuitas Ketersediaan
2. Masyarakat belum memahami Informasi Konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
3. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang menjangkau seluruh wilayah konsume.
4. Kesadaran Masyarakat akan Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang terbebas dari bahan kimia dan berbahaya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan
kabupaten Tapin

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN				15.274.984.474	URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN				6.021.000.000
	BIDANG URUSAN PANGAN					BIDANG URUSAN PANGAN				
	PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100%	5.024.984.474	PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100%	4.381.677.818
Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran			100%	Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran				100%		
Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%			100%	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%				100%		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	96.126.300	
		Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%			Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%		
		Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%			Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	96.126.300

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang Sesuai dengan Standar penatausahaan keuangan	100%	2.780.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang Sesuai dengan Standar penatausahaan keuangan	100%	2.425.312.552
			Persentase Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100%				Persentase Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100%	
			Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang di Tindak Lanjuti	100%				Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang di Tindak Lanjuti	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/Bulan	2.700.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/Bulan	2.384.912.552	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	40.400.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.664.984.474	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.549.402.700	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	7.938.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	364.984.474	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	279.033.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	105.579.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.481.000
	Penyediaan Bahan/Material	Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.309.300
	Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	1.095.000.000	Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	1.127.062.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Kondisinya Baik	100%	150.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Kondisinya Baik	100%	127.924.776

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.061.552
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.863.224
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Kondisinya Baik	100%	280.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Kondisinya Baik	100%	182.911.490
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	122.659.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.968.650

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.283.640
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase Insfrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	100%	1.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase Insfrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	100%	-
	Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh Pendukung	100%	1.000.000.000	Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh Pendukung	100%	-
	Penyediaan Insfrastruktur Lumbung Pangan	Tapin	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2 unit	1.000.000.000	Penyediaan Insfrastruktur Lumbung Pangan	Tapin	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2 unit	-
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100%	7.700.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100%	1.349.287.832

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	700.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	313.916.070
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tapin	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	55.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tapin	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	26.949.500
Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Tapin	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	500.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Tapin	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	212.640.570
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tapin	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tapin	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	31.703.000
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tapin	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	50.000.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tapin	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	25.253.000
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	45.000.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	17.370.000

	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan / stok cadangan pangan daerah yang tersedia	100%	6.000.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan / stok cadangan pangan daerah yang tersedia	100%	600.333.600
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	-	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	309.186.500
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	6.000.000.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	291.147.100
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase Peningkatan konsumsi sayur dan buah	100%	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase Peningkatan konsumsi sayur dan buah	100%	435.038.162,00
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tapin	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	500.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tapin	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	188.647.500
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tapin	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2 Laporan	500.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tapin	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2 Laporan	246.390.662

			Berbasis Sumber Daya Lokal					Berbasis Sumber Daya Lokal		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100%	300.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100%	210.103.650
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	100%	100.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	100%	63.703.750
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tapin	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	100.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tapin	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	63.703.750
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	200.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	146.399.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	146.399.900

	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	100%	1.250.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	100%	79.930.700
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bahan pangan segar yang diujikan	100%	1.250.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bahan pangan segar yang diujikan	100%	79.930.700
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	79.930.700
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	2 Dokumen	250.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	2 Dokumen	-
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50 Sertifikat	250.000.000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50 Sertifikat	-
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	250.000.000	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	-

	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	250.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tapin	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	-
--	---	-------	--	------------	-------------	---	-------	--	------------	---

2.4 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan lain salah satunya melalui Safari Jumat yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin itu sendiri.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,

- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor

nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksport batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

- a. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
- b. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
- c. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
- d. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan

wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

- a. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;
- b. Penyediaan infrastruktur wilayah;
- c. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
- c. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
- d. Shifting struktur perekonomian daerah
- e. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
- f. Ketahanan Pangan

- g. Ketahanan Energi
- h. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
- i. Bonus Demografi
- j. Implementasi SPM dalam pelayanan public

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Tujuan dan sasaran serta target indikator sasaran pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapin

NO	TUJUAN/SASARAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA INDIKATOR	
				2024	AKHIR PERIODE
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat daerah	74	76
		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	22,9	22,9
			Nilai Komponen SAKIP (Pengukuran Kinerja)	21,9	21,9
			Nilai Komponen SAKIP (Pelaporan Kinerja)	10,95	12,95
			Nilai Komponen SAKIP (Evaluasi Kinerja)	18,25	18,25
2	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan Daerah		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88	90
		Meratanya Cadangan Pangan di Seluruh Wilayah	Persentase Cadangan Pangan	100	100

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan RPD Kabupaten Tapin 2024 - 2026, Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin berada dalam Layanan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Memiliki 4 (empat) Program yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Outcome yang harus dicapai yaitu : Capaian SAKIP Perangkat Daerah. Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Outcome yang harus dicapai adalah Skor Pola Pangan Harapan (90%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Bebasnya desa bebas rawan pangan (2 Desa), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji (100%/ 4 Sampel Pangan) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD I Kalsel). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Tolak Ukur	Target	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN						6.021.000.000				13.383.533.657
BIDANG URUSAN PANGAN										
PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100%	4.381.677.818			100%	4.703.533.657

DAERAH KABUPATEN KOTA				Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran	100%				100%	
				Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100%				100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	96.126.300			100%	150.000.000
				Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%				100%	

				Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%				100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	96.126.300			13 Laporan	150.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang Sesuai dengan Standar penatausahaan keuangan	100%	2.425.312.552			100%	2.780.000.000

				Persentase Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100%				100%	
				Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang di Tindak Lanjuti	100%				100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/Bulan	2.384.912.552			16 orang/Bulan	2.700.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	40.400.000			2 Laporan	80.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN	100%	1.549.402.700			100%	1.428.533.657
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	7.938.000			1 Paket	25.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	279.033.000			5 Paket	250.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	105.579.000			3 paket	120.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.481.000			2 Paket	50.000.000
Penyediaan Bahan/Material			Tapin	Jumlah Paket Bahan/Materi	1 Paket	4.309.300			1 Paket	10.000.000

				al yang Disediakan					
Penyelenggaraab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	1.127.062.400		250 laporan	973.533.657
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sekretariat	100%	127.924.776		100%	140.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.061.552		12 Laporan	60.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	75.863.224		1 Laporan	80.000.000

				yang Disediakan						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	182.911.490			100%	205.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	122.659.200			24 Unit	125.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.968.650			20 Unit	30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	44.283.640			1 Unit	50.000.000

				Dipelihara/Dir ehabilitasi						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				Persentase Insfrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	100%	-			100%	1.000.000.000
Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh Pendukung	100%	-			100%	1.000.000.000
Penyediaan Insfrastruktur Lambung Pangan			Tapin	Jumlah Lambung Pangan yang Tersedia	2 unit	-			2 unit	1.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100%	1.349.287.832			100%	6.400.000.000

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	313.916.070			100%	600.000.000
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			Tapin	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	26.949.500			2 Laporan	55.000.000
Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal			Tapin	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	212.640.570			2 Laporan	400.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Tapin	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	31.703.000			2 Laporan	50.000.000

Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			Tapin	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	25.253.000			2 Dokumen	50.000.000
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	17.370.000			3 Unit	45.000.000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				Persentase ketersediaan / stok cadangan pangan daerah yang tersedia	100%	600.333.600			100%	5.000.000.000
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	309.186.500			10 Ton	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	291.147.100			10 Ton	5.000.000.000

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				Persentase Peningkatan konsumsi sayur dan buah	100%	435.038.162,00			100%	800.000.000
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			Tapin	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	188.647.500			2 Dokumen	400.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Tapin	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	246.390.662			2 Laporan	400.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100%	210.103.650			100%	230.000.000
Penyusunan Peta Kerentanan dan				Persentase Hasil analisa peta	100%	63.703.750			100%	80.000.000

Ketahanan Pangan Kecamatan				kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun						
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			Tapin	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	63.703.750			2 Dokumen	80.000.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	146.399.900			100%	150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	146.399.900			2 Laporan	150.000.000
PROGRAM PENGAWASAN				Persentase Skor Sampel	100%	79.930.700			100%	1.050.000.000

KEAMANAN PANGAN				Pangan Segar yang Lulus Uji						
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				Persentase bahan pangan segar yang diujikan	100%	79.930.700			100%	1.050.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	79.930.700			1 Dokumen	250.000.000
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	2 Dokumen	-			2 Dokumen	200.000.000
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	50 Sertifikat	-			50 Sertifikat	200.000.000

				Kabupaten/Kota						
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	-			50 Dokumen	200.000.000
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	-			50 Dokumen	200.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan 2024 - 2026 dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024. Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, penyusunan Rencana Kerja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Ketahanan Pangan maupun dilingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen .

BUPATI TAPIN



M. ARIFIN ARFAN